

Paket 1

HAKIKAT PEMBELAJARAN PKn MI

Pendahuluan



Perkuliahan pertama pada mata kuliah pembelajaran PKn MI ini difokuskan pada materi hakikat pembelajaran PKn MI yang meliputi latar belakang, pengertian, tujuan dan ruang lingkup pembelajaran PKn MI. Paket pertama ini melandasi seluruh paket pembelajaran PKn MI yang akan dibahas pada buku bahan ajar pembelajaran PKn MI.

Pada awal perkuliahan, mahasiswa-mahasiswi dimotivasi untuk menyadari pentingnya seorang guru PKn memahami hakikat pembelajaran PKn. Setelah menyampaikan tujuan dan langkah-langkah perkuliahan pada paket ini, dosen meminta mahasiswa-mahasiswi menemukan dan mengidentifikasi nilai-nilai luhur bangsa yang perlu terus diwariskan kepada setiap warga negara, dan menulisnya dalam kertas kosong, dan secara acak beberapa mahasiswa-mahasiswi diminta membacakan hasil tulisannya, mahasiswa-mahasiswi yang lain mengkritisi dan memberikan komentar. Selanjutnya, dosen memberikan penguatan terhadap latar belakang pentingnya PKn untuk MI. Langkah berikutnya, mahasiswa-mahasiswi diminta menelaah dan mendiskusikan pengertian pembelajaran PKn yang dirumuskan oleh para ahli, dan secara acak mahasiswa-mahasiswi diminta menyampaikan pendapatnya. Dosen memberikan penguatan tentang pengertian pembelajaran PKn MI. Berikutnya, mahasiswa-mahasiswi berdiskusi tujuan dan ruang lingkup Pembelajaran PKn MI. Untuk menegaskan tujuan dan ruang lingkup Pembelajaran PKn MI, dosen memberikan penguatan dan memberi kesempatan mahasiswa-mahasiswi bertanya. Pada akhir sesi, dosen memberi tugas mahasiswa-mahasiswi untuk mengerjakan lembar penilaian.

Penyiapan LCD dan komputer atau media lain yang relevan cukup penting dalam perkuliahan ini untuk mengefektifkan perkuliahan paket ini. Bahan perkuliahan ini dilengkapi dengan Lembar Kerja dan Lembar Penilaian. Mahasiswa-mahasiswi disarankan membaca uraian materi terlebih dahulu.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan



Kompetensi dasar

Mahasiswa-mahasiswi mampu memahami hakikat pembelajaran PKn MI

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswi diharapkan dapat:

1. menjelaskan latar belakang pembelajaran PKn MI,
2. menjelaskan pengertian pembelajaran PKn MI,
3. mendeskripsikan tujuan pembelajaran PKn MI, dan
4. mendeskripsikan ruang lingkup pembelajaran PKn MI.

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

1. Latar belakang pembelajaran PKn MI
2. Pengertian pembelajaran PKn MI
3. Tujuan pembelajaran PKn MI
4. Ruang lingkup pembelajaran PKn MI

Kelengkapan Bahan Perkuliahan

1. Lembar Kegiatan 1.1
2. Lembar Uraian Materi 1.2
3. Lembar *Slide PowerPoint* 1.3
4. Lembar Penilaian 1.4

Langkah-Langkah Perkuliahan			
Waktu	Langkah perkuliahan	Metode	Bahan
10'	<i>Kegiatan Awal</i> 1. Dosen melakukan curah pendapat pentingnya pembelajaran PKn MI dengan pertanyaan, "Mengapa guru MI perlu mengetahui hakikat pembelajaran PKn MI?"	<i>Brainstorming</i> (Curah pendapat)	Lembar <i>PowerPoint</i> 1.3
5'	2. Dosen menyampaikan kompetensi dasar, indikator, pokok-pokok materi dan langkah-langkah perkuliahan yang akan dilakukan.	Ceramah	Lembar <i>PowerPoint</i> 1.3
10'	<i>Kegiatan Inti</i> 1. Dosen mengajak mahasiswa-mahasiswi mengidentifikasi nilai-nilai luhur bangsa yang perlu ditanamkan dan dimiliki oleh setiap warga negara. Kemudian, secara individual mahasiswa-mahasiswi diminta menulis nilai-nilai luhur tersebut dalam kertas kosong.	Inkuiri	Kertas kosong
	2. Secara acak beberapa mahasiswa-mahasiswi diminta membacakan hasil tulisannya, dan mahasiswa-mahasiswi lain mengkritisi dan memberikan komentar.	Presentasi	
5'	3. Dosen memberikan penguatan tentang latar belakang pembelajaran PKn MI.	Ceramah	Lembar <i>PowerPoint</i> 1.3
10'	4. Mahasiswa-mahasiswi diminta menelaah dan mencermati beberapa pengertian pembelajaran PKn yang dirumuskan oleh para ahli, dan secara acak beberapa mahasiswa-mahasiswi diminta menyampaikan pendapatnya.	<i>Reading seach</i>	Uraian Materi 1.2

5'	5. Dosen memberikan penguatan tentang pengertian pembelajaran PKn MI	Ceramah	Lembar <i>PowerPoint</i> 1.3
15'	6. Mahasiswa-mahasiswi berdiskusi dalam 3 kelompok (pembagian kelompok proporsional antara laki-laki dan perempuan) tentang tujuan dan ruang lingkup pembelajaran PKn MI.	Diskusi Kelompok	Lembar Kegiatan 1.1.
15'	7. Secara bergiliran perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi, dan kelompok lain menanggapi.	Presentasi	
5'	8. Dosen memberikan penguatan dan memberi kesempatan mahasiswa-mahasiswi bertanya.	Ceramah dan tanya jawab	Lembar <i>PowerPoint</i> 1.3
10'	9. Dosen meminta mahasiswa-mahasiswi mengerjakan lembar penilaian 1.4.	Penilaian	Lembar Penilaian 1.4
5'	<i>Kegiatan Penutup</i> Mahasiswa-mahasiswi bersama dosen melakukan refleksi mengenai hakikat Pembelajaran PKn MI	Presentasi	
5'	<i>Kegiatan Tindak Lanjut</i> Dosen memberikan tugas mahasiswa-mahasiswi menelaah materi paket 2 tentang karakteristik materi pembelajaran PKn MI	Penugasan	

Lembar Kegiatan 1.1



Tujuan dan Ruang Lingkup Pembelajaran PKn

Tujuan

Melakukan indentifikasi tujuan dan ruang lingkup pembelajaran PKn MI.

Alat dan Bahan

- Uraian materi 1.2
- Kertas kosong
- Alat tulis

Langkah Kegiatan

1. Diskusikan, tujuan dan ruang lingkup pembelajaran PKn MI dalam 3 kelompok, tugas masing-masing kelompok :
Kel. 1. Temukan rumusan tujuan pembelajaran PKn menurut beberapa ahli
Kel. 2. Temukan ruang lingkup pembelajaran PKn menurut Permendiknas 22/2006
Kel. 3. Identifikasikan ruang lingkup pembelajaran PKn MI menurut hasil Workshop PGMI tahun 2008
2. Presentasikan dan laporkan hasil diskusi kelompok dalam bentuk tulisan dengan model yang baik (sesuai dengan kreativitas kelompok masing-masing)

Uraian Materi 1



HAKIKAT PEMBELAJARAN PKn MI

A. Latar Belakang Pembelajaran PKn MI

Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Hakikat negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan --atau nasionalisme-- yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya.* (Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, Sekretariat Negara RI, 1998). Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perlu ditingkatkan secara terus menerus untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara historis, negara Indonesia telah diciptakan sebagai Negara Kesatuan dengan bentuk Republik.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah *negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia* (Pembukaan UUD 1945). Dalam perkembangannya sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan penghujung abad ke-20, rakyat Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa yang mengancam keutuhan negara. Untuk itu diperlukan pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat serta konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi Negara Republik Indonesia perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda sebagai generasi penerus.

Indonesia harus menghindari sistem pemerintahan otoriter yang memasung hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kehidupan yang demokratis di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintahan, dan organisasi-organisasi non-pemerintahan perlu dikenal, dipahami, diinternalisasi, dan diterapkan demi terwujudnya pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, perlu pula ditanamkan kesadaran bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian

lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, serta sikap dan perilaku antikorupsi, kolusi, dan nepotisme.

Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

B. Pengertian Pembelajaran PKn MI

Istilah PKn yang menggunakan dengan "N" huruf Kapital merupakan singkatan dari *Pendidikan Kewargaan Negara*, sedangkan PKn yang menggunakan "n" huruf kecil merupakan singkatan dari *Pendidikan Kewarganegaraan*. Kedua istilah tersebut tidak sama makna dan pengertiannya.

Menurut pandangan Soemantri (1967), Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) identik dengan istilah *civic*, yaitu mata pelajaran yang bertujuan membentuk atau membina warganegara yang baik, warganegara yang tahu, mau, sadar akan hak dan kewajibannya. Tujuan PKN ini untuk mewujudkan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, sehingga lebih menekankan pada pemenuhan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk sikap, perilaku dan perbuatan yang baik (Ruminiati, 2008).

Pendidikan kewarganegaraan (PKn) merupakan pendidikan yang menyangkut status formal warganegara yang diatur dalam UU NO 2 tahun 1949, Jo UU NO 62 tahun 1958, Jo UU no 12 tahun 2006 tentang status warganegara yang telah berlaku mulai tanggal, 1 Agustus 2006.

Wahab dan Winataputra (2005) menyatakan bahwa perubahan istilah PKN menjadi PKn perlu diartikan adanya pergeseran makna. Istilah PKn yang secara teknis diartikan sebagai status formal warga negara bergeser maknanya menjadi hal-hal yang berkenaan dengan warga negara, yang tentunya termasuk status formal warga negara. Sedangkan secara semantik, Kn berasal dari WN. Kewarganegara-an (Kn) dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan warga negara.

Berdasarkan pandangan Wahab dan Winataputra tersebut, istilah PKn dalam buku ajar MI tetap menggunakan "n" huruf kecil, dengan makna sebagai "N" huruf kapital, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran warga negara terhadap hak dan kewajibannya sebagai warganegara yang baik.

Dalam pandangan Zamroni, pendidikan kewarganegaraan adalah Pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru, tentang kesadaran bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Berbeda dengan Zamroni, Somantri menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) itu ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut : (a) merupakan kegiatan yang meliputi seluruh program sekolah, (b) meliputi berbagai macam kegiatan mengajar yang dapat menumbuhkan hidup dan perilaku yang lebih baik dalam masyarakat demokratis, (c) termasuk juga menyangkut pengalaman, kepentingan masyarakat, pribadi, dan syarat-syarat objektif untuk hidup bernegara (A. Ubaidillah, 2006: 8).

Sejalan dengan perubahan tersebut, Azyumardi Azra (2006) lebih suka menggunakan istilah *Pendidikan Kewargaan* yang tidak perlu ada singkatan (PKn atau PKN). Pendidikan kewargaan adalah pendidikan yang cakupannya lebih luas dari pendidikan demokrasi dan pendidikan HAM, karena mencakup kajian dan pembahasan tentang banyak hal, yakni (a) pengetahuan tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, *rule of law*, hak dan kewajiban warga negara, proses demokrasi, partisipasi aktif dan keterlibatan warganegara dalam masyarakat madani, (b) pengetahuan tentang lembaga-lembaga dan sistem yang terdapat dalam pemerintahan, warisan politik, administrasi publik dan sistem hukum, dan (c) pengetahuan tentang proses seperti kewarganegaraan aktif, refleksi kritis, pendidikan dan kerja sama, keadilan sosial, pengertian antarbudaya dan keselarasan lingkungan hidup dan hak asasi manusia.

C. Tujuan Pembelajaran PKn MI

Berdasarkan Permendiknas No. 22/2006 tentang Standar Isi Kurikulum Nasional, tujuan Pembelajaran PKn di MI agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut.

- 1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
- 2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi
- 3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya

- 4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Lebih lanjut, tujuan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, menurut Mulyasa (2007) adalah untuk menjadikan siswa dan siswi:

- 1) mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi persoalan hidup maupun isu kewarganegaraan di negaranya,
- 2) mau berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan, secara aktif dan bertanggung jawab, sehingga dapat bertindak secara cerdas dalam semua kegiatan, dan
- 3) dapat berkembang secara positif dan demokratis, sehingga mampu hidup bersama dengan bangsa lain di dunia dan mampu berinteraksi, serta mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik.

Dengan demikian tujuan pembelajaran PKn MI adalah untuk menjadikan warganegara yang baik, yaitu warganegara yang tahu, mau, dan sadar akan hak dan kewajibannya. Dengan demikian, diharapkan kelak dapat menjadi bangsa yang terampil dan cerdas, dan bersikap baik sehingga mampu mengikuti kemajuan teknologi modern.

D. Ruang Lingkup Pembelajaran PKn MI

Ruang lingkup pembelajaran PKn MI sebagaimana yang dinyatakan pada kurikulum nasional yang tercantum dalam Permendiknas 22/2006 tentang Standar Isi adalah sebagai berikut :

- 1) Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan.
- 2) Norma, hukum, dan peraturan, meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistim hukum dan peradilan nasional, dan hukum dan peradilan internasional.
- 3) Hak asasi manusia, meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.
- 4) Kebutuhan warganegara, meliputi hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara.

- 5) Konstitusi negara, meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara dengan konstitusi.
- 6) Kekuasaan dan politik, meliputi pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi-pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi.
- 7) Kedudukan Pancasila, meliputi kedudukan pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.
- 8) Globalisasi, meliputi globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi.

Berdasarkan hasil Workshop LAPIS PGMI tahun 2008, ruang lingkup matakuliah pembelajaran PKn MI yang disampaikan di PGMI seluruh Indonesia meliputi materi pembahasan sebagai berikut :

1. Karakter pembelajaran PKn di MI.
2. Langkah-langkah pengembangan indikator dan penentuan materi untuk pembelajaran PKn MI
3. Strategi, metode, media / alat dan sumber pembelajaran PKn MI
4. Model-model pembelajaran PKn MI
5. Rancangan Penilaian pembelajaran PKn MI
6. Silabus dan RPP pembelajaran PKn MI
7. Praktik pembelajaran PKn MI

Latihan

1. Jelaskan yang dimaksud dengan negara kebangsaan modern!
2. Jelaskan pentingnya pembelajaran PKn MI!
3. Jelaskan pandangan Soemantri tentang istilah "PKN" dengan "PKn"!
4. Apa perbedaan pengertian PKn dan *civic education*!
5. Jelaskan pandangan para ahli tentang tujuan pembelajaran PKn!
6. Jelaskan ruang lingkup pembelajaran PKn MI menurut kurikulum Nasional yang tercantum dalam Permendiknas 22 / 2006!

Rangkuman

1. Latar belakang pentingnya pembelajaran PKn MI adalah komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Istilah *Pendidikan Kewargaan Negara* (PKN) dan *Pendidikan Kewarganegaraan* (PKn) mempunyai makna dan pengertian yang berbeda. Menurut pandangan Soemantri (1967), Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) identik dengan istilah *civic*, yaitu mata pelajaran yang bertujuan membentuk atau membina warganegara yang baik, sedangkan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan pendidikan yang menyangkut status formal warganegara yang diatur dalam UU NO 2 tahun 1949, Jo UU NO 62 tahun 1958, Jo UU no 12 tahun 2006 tentang status warganegara yang telah berlaku mulai tanggal, 1 Agustus 2006.
3. Tujuan Pembelajaran PKn MI adalah untuk menjadikan warganegara yang baik, yaitu warga negara yang tahu, mau, dan sadar akan hak dan kewajibannya. Dengan demikian, diharapkan kelak dapat menjadi bangsa yang terampil dan cerdas, dan bersikap baik sehingga mampu mengikuti kemajuan teknologi modern.
4. Ruang lingkup pembelajaran PKn MI meliputi pembahasan tentang (1) persatuan dan kesatuan bangsa (2) norma, hukum, dan peraturan (3) hak asasi manusia (4) kebutuhan warganegara (5) konstitusi negara (6) kekuasaan dan politik (7) kedudukan Pancasila (8) dan globalisasi.

Lembar PowerPoint 1.3



PAKET 1 HAKIKAT PEMBELAJARAN PKn MI

100 MENIT

BRAINSTORMING (10')

Mengapa seorang guru MI perlu memahami hakikat pembelajaran PKn MI?

KOMPETENSI DASAR

Mahasiswa-mahasiswi mampu memahami hakikat pembelajaran Pkn Mi

INDIKATOR

- ❖ menjelaskan latar belakang pembelajaran PKn MI
- ❖ menformulasikan pengertian pembelajaran PKn MI
- ❖ mendiskripsikan tujuan pembelajaran PKn MI
- ❖ mendiskripsikan ruang lingkup pembelajaran PKn MI

POKOK MATERI

- ❖ latar belakang pembelajaran PKn MI
- ❖ pengertian pembelajaran PKn MI
- ❖ tujuan pembelajaran PKn MI
- ❖ ruang lingkup pembelajaran PKn MI

LANGKAH PERKULIAHAN

- Brainstorming (10')
- Ceramah (5')
- Inkuri (10')
- Penguatan (5')
- Reading Guide (10')
- Penguatan (5')
- Diskusi Kelompok (30')
- Penguatan & Tanya Jawab (10')
- Penilaian (10')
- Refleksi dan Tindak Lanjut (10')

INKUIRI

1. Dosen mengajak mahasiswa-mahasiswi mengidentifikasi nilai-nilai luhur bangsa yang perlu ditanamkan dan dimiliki oleh setiap warga negara. Kemudian, secara individual mahasiswa-mahasiswi diminta menulis nilai-nilai luhur tersebut dalam kertas kosong.

Penguatan (5')

LATAR BELAKANG PEMBELAJARAN PKn MI

Bangsa Indonesia mempunyai nilai-nilai perjuangan: Nasionalisme Rela berkorban, patriotisme, cinta tanah air, gotong royong, musyawarah, dll.

Lanjutan

Nilai-nilai tersebut perlu ditanamkan kepada bangsa Indonesia dari generasi ke generasi berikutnya.

Siswa-siswi MI perlu mendapatkan pemawrisan nilai-nilai tersebut untuk menghadapi masa depannya

Reading Seach

- Cermatilah beberapa pengertian pembelajaran PKn yang dirumuskan oleh para ahli pada buku anda!
- Secara acak beberapa mahasiswa-mahasiswi diminta menyampaikan hasil tela'ahnya.

Penguatan (5')

PENGERTIAN PEMBELAJARAN PKn MI

PKn identik dengan :

- *Citizenship*
- *Civics*
- *Civics Education*

PENGERTIAN PEMBELAJARAN PKn MI

Pembelajaran PKn MI adalah suatu program pendidikan yang di MI yang berupa sosialisasi dan aktuliasasi konsep, sistem, nilai, budaya dan praktik demokrasi yang meliputi unsur-unsur hak dan kewajiban warga negara dalam negara Indonesia.

SUBSTANSI PEMBELAJARAN PKn MI

Secara substantif Pembelajaran PKn MI menyangkut sosialisasi, diseminasi dan aktualisasi konsep, sistem, nilai, budaya dan praktik demokrasi melalui pendidikan yang meliputi unsur-unsur hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara dalam suatu negara

Diskusi Kelompok (30')

- Mahasiswa-mahasiswi berdiskusi dalam 4 kelompok (pembagian kelompok proporsional antara laki-laki dan perempuan) tentang tujuan dan ruang lingkup pembelajaran PKn MI.
- Secara bergiliran perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi, dan kelompok lain menanggapi.

Penguatan

Tujuan dan ruang lingkup pembelajaran PKn MI

Tujuan Pembelajaran PKn MI

- **Agar peserta didik memiliki kemampuan:**
- **Berfikir kritis, rasional, kreatif,**
- **Berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab**
- **Berkembang secara positif dan demokratis**
- **Berinteraksi dengan bangsa- bangsa dan berkomunikasi**

Lanjutan

Untuk menjadikan warganegara Indonesia yang baik, yakni warga negara yang tahu, mau dan sadar akan hak kewajibannya

Ruang Lingkup Pemb. PKn MI

- Hakikat / Karakteristik Pemb. PKn MI.
- Langkah Pengembangan Indikator dalam Pemb. PKn MI
- Strategi, metode, media/ alat dan sumber belajar PKn MI,
- Model-Model Pembelajaran PKn MI,
- Pengembangan alat penilaian Pemb. PKn MI,
- Silabus dan RPP Pemb. PKn MI,
- Praktik Pemb. PKn MI
-

Evaluasi

Tes Tulis

Petunjuk : Kerjakan semua soal di bawah ini !

- 1. Jelaskan pentingnya pembelajaran PKn MI !**
- 2. Jelaskan pandangan Soemantri tentang istilah "PKN" dengan "PKn" !**
- 3. Apa perbedaan pengertian PKn dan *civic education* !**
- 4. Jelaskan pandangan para ahli tentang tujuan pembelajaran PKn!**
- 5. Jelaskan ruang lingkup pembelajaran PKn MI menurut kurikulum Nasional yang tercantum dalam Permendiknas 22 / 2006 !**

Lembar Penilaian 1.1A



A. Tes Tulis

Petunjuk : Kerjakan semua soal di bawah ini !

1. Jelaskan pentingnya pembelajaran PKn MI!
2. Jelaskan pandangan Soemantri tentang istilah "PKN" dengan "PKn"!
3. Apa perbedaan pengertian PKn dan *civic education*!
4. Jelaskan pandangan para ahli tentang tujuan pembelajaran PKn!
5. Jelaskan ruang lingkup pembelajaran PKn MI menurut kurikulum Nasional yang tercantum dalam Permen 22 / 2006!

B. Penilaian Kinerja (Performance)

Penilaian kinerja ini digunakan oleh dosen untuk melakukan penilaian proses pada setiap kali tatap muka, sehingga diharapkan dalam 14 kali tatap muka dosen sudah menilai semua mahasiswa-mahasiswi. Penilaian ini diarahkan pada:

1. kemampuan mengemukakan pendapat,
2. kemampuan bekerjasama,
3. partisipasi dalam diskusi, dan
4. kemampuan menanggapi masalah

Format Penilaian

(Contoh partisipasi dalam diskusi)

No	Nama	Nilai Mengemukakan Pendapat	Nilai Bekerjasama	Nilai Partisipasi	Nilai Menanggapi Masalah
1.	Mursyidah	65	85	65	70

Rubrik Penilaian

Tingkat Pencapaian	Kualifikasi	Diskripsi
90–100	Sangat Baik	
80–89	Baik	
65–79	Cukup	
55–64	Kurang	
10–54	Sangat Kurang	

Daftar Pustaka

- Azra, Azymardi, 2002. "*Pendidikan Kewargaan untuk Demokrasi di Indonesia*", Makalah Seminar Nasional *Pendidikan Kewargaan (Civic Education)* di Perguruan Tinggi, Jakarta, 28-29 Mei 2002.
- Ruminiati, 2008. *Pengembangan PKn SD*, Jakarta: Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi
- Ruminiati, 2007. *Pengembangan PKn SD, (disampaikan pada Diklat Guru SD /PLPG)*, Malang: Universitas Negeri Malang.
- Ruminiati, 2008. *Pengembangan PKn SD, (disampaikan pada Diklat Guru SD /PLPG)*, Malang: Universitas Negeri Malang.
- Sumantri, Muhammad Numan, 2001. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Sumarsono, dkk. 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sekretariat Negara, Kurikulum Pendidikan Nasional 2006,
- Permendiknas 22 tentang Standar Isi
- Permendiknas 23 tentang Standar Kompetensi Lulusan
- Ubaidillah, A. Dkk, 2006. *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta, ICCE, UIN Syarif Hidayatullah.
- Winataputra, Udin, 2001. *Apa dan Bagaimana Pendidikan Kewarganegaraan*, Makalah Lokakarya Civic Education Dosen IAIN/STAIN Se-Indonesia, Sawangan-Depok.
- Yusra, Dhoni. 2006. *Membangun Karakter dan Kepribadian melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Zamroni, 2001, *Pendidikan untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil Society*, Yogyakarta: BIGRAF Publishing